



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

ZAENAL MA'ARIF

NPM. 211003742018670

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
ZAENAL MA'ARIF
NPM. 211003742018670

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. BAMBANG TOYO SUPENO, S.H., M.Hum
NIDN. 0609026301

Anggota,

JUHARI, S.H., M.Hum
NIDN. 0629036301

Anggota,

Dr. BUDI PRASETYO, S.H., M.Hum
NIDN. 0612016101

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	8
B. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum	10
C. Pengertian Tindak Pidana	12
D. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	13
E. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan	16
F. Jenis-Jenis Penggelapan	19
G. Pengertian Kendaraan Bermotor	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	27
F. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	29

A. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan	29
B. Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor Di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui kendala dan solusi penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor Di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu bersama dengan Kanit Reskrim Kedungwuni dan pelaku terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai proses mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas jaringan pelaku yang menggunakan teknologi untuk menyamarkan jejak, serta minimnya bukti yang cukup dalam beberapa kasus. Selain itu, peraturan yang kurang spesifik juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna memastikan implementasi peraturan yang konsisten. Penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pelacakan GPS dan analisis data berbasis AI, dapat mempercepat proses pengungkapan kasus. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas penyidik yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan solusi-solusi ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diharapkan dapat lebih optimal dan efektif

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Penegakan Hukum, Penggelapan, Tindak Pidana.